



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERY FAHRUDIN MUNIR
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 497124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.869.500.000**

1. Tanah Seluas 1.295 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah Seluas 7.086 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
3. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 2.125 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.062.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/80 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
7. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 250.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 170.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	117.736.999
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.407.236.999
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.407.236.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.